



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2026



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025**

Jl. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Kode Pos 62217

Telp.(0322)321704, Fax. 316147

Pos-el: [dinsos@lamongankab.go.id](mailto:dinsos@lamongankab.go.id)

Laman: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2026



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025**

Jl. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Kode Pos 62217

Telp.(0322)321704, Fax. 316147

Pos-el: [dinsos@lamongankab.go.id](mailto:dinsos@lamongankab.go.id)

Laman: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan, Jawa Timur 62214  
Telepon (0322) 321704 Faximile (0322) 316147, Pos-el : [dinsos@lamongankab.go.id](mailto:dinsos@lamongankab.go.id)  
Laman : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 188/44/KEP/413.106/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
  19. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2021 tentang kedua atas tentang Pembentukan;
  20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
  21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Lamongan Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2026.
- KESATU** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2026 terdiri dari pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2026 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada Tanggal : 29 Juli 2025



**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN**

**FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730509 199803 2 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.  
Lamongan

Nomor : 188/44/KEP/413.106/2025

Tanggal : 29 Juli 2025

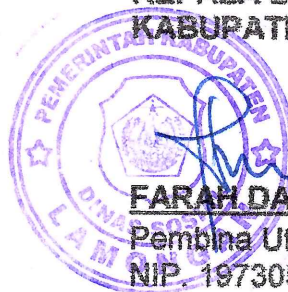
**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Penanggungjawab	FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Sosial Kab. Lamongan
2.	Ketua	MARGONO JAYA PUTRA, S.H., M.Si	Sekretaris Dinas Sosial
3.	Sekretaris	APRILIA DEWI MAHARANI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
4.	Anggota	LISWATIN, S.Sos, MM	Kabid. Penanganan Fakir Miskin
5.	Anggota	YUSUP EFFENDI, S.IP	Kabid. Pemberdayaan Sosial
6.	Anggota	S. AGUS KURNIAWAN, SE, MM	Kabid. Rehabilitasi Sosial
7.	Anggota	LISWATIN, S.Sos, MM	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
8.	Anggota	ANAH AZEMI, SE	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
9.	Anggota	SITI MUTMAINAH, S.AP	JFT Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
10.	Anggota	NANIK HERAWATI, S.Psi, MM	Staf Bagian Keuangan
11.	Anggota	MIZHAROTUL FU'ADIYAH	Staf Bagian Perencanaan dan Evaluasi
12.	Anggota	HENKHY CUT PERMANA	Staf Bagian Perencanaan dan Evaluasi
13.	Anggota	SHOFI LAILATUL MASRURO, S.S	Staf Bagian Keuangan

14.	Anggota	NOVA DWI QOMARIYAHTI	Staf Bagian Keuangan
15.	Anggota	AZAM WISMANTARA, SE	JFT Bidang Pemberdayaan Sosial
16.	Anggota	RATNA UTAMI TAHTIMI, SE, MM	JFT Bidang Penanganan Fakir Miskin
17.	Anggota	KUSNAH, S.KM	JFT Bidang Rehabilitasi Sosial
18.	Anggota	HENDRA, SE	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada Tanggal : 29 Juli 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN**



**FARAH DAMAYANTI Z. S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730509 199803 2 005

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2026 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor . 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2026, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lamongan yang sejahtera dan lebih baik.

Lamongan, 29 Juli 2025



**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN**

**FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730509 199803 2 005

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2025 .....	27
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan .....	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	44
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan .....	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	56
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 .....	57
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>58</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	61
3.3 Program dan Kegiatan .....	65

<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>71</b>
	Tabel T-C.33 Rumusan Rancangan Rencana Program	72
	dan Kegiatan tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 .....	
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>83</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **900.1.15.5-1317** Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2026 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2026 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2021 tentang kedua atas tentang Pembentukan;
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Lamongan Tahun 2026.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk

mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2026.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;  
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Kab. Lamongan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;  
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kab. Lamongan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kab. Lamongan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tabel T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kab. Lamongan

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat :

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program Dan Kegiatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**

#### **DAERAH**

Tabel T.C.33 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kab. Lamongan

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Renja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama tahun 2026 dan perkiraan target tahun 2027.

Program dan Kegiatan yang terealisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan bidang sosial pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. **17.445.330.839,-** dan realisasi sebesar Rp. **16.512.114.121,-** atau **94,65%** dan capaian target kinerja **142,01%**.

## Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	SOSIAL	<b>17.445.330.839</b>	<b>16.512.114.121</b>	<b>94,65</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>4.876.331.650</b>	<b>4.254.371.521</b>	<b>87,25</b>
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>92.500.000</b>	<b>86.591.750</b>	93,61
1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	12.913.500	86,09
1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.500.000	73.678.250	95,07
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>3.863.867.650</b>	<b>3.329.947.292</b>	<b>86,18</b>
1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.826.367.650	3.292.447.292	86,05
1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500.000	12.500.000	100
1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	25.000.000	100
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>105.497.900</b>	<b>88.668.150</b>	<b>84,05</b>
1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.740.000	10.678.000	90,95
1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.106.400	12.920.100	98,58
1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.200.500	25.906.400	80,45
1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	8.119.750	81,20
1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	5.040.000	50,40
1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.451.000	26.003.900	91,40
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>20.000.000</b>	<b>19.150.000</b>	<b>95,75</b>
1.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000	9.550.000	95,50
1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.600.000	96,00
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>631.684.000</b>	<b>597.255.129</b>	<b>94,55</b>
1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000	95.776.557	81,86
1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.920.000	11.732.000	78,63
1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.764.000	489.746.572	98,00
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>162.782.100</b>	<b>132.759.200</b>	<b>81,56</b>
1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.782.100	83.202.600	80,95
1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	-	0,00
1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.556.600	99,11
2	Program Pemberdayaan Sosial	<b>3.284.000.000</b>	<b>3.249.606.000</b>	<b>98,95</b>
2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	<b>3.284.000.000</b>	<b>3.249.606.000</b>	<b>98,95</b>

	Kabupaten/Kota			
2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	8.600.000	86,00
2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	173.000.000	155.400.000	89,83
2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	-	0,00
2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.081.000.000	3.077.006.000	99,87
2.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000	8.600.000	86,00
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>
3.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>
3.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	10.000.000	10.000.000	100
4	Program Rehabilitas Sosial	<b>310.000.000</b>	<b>307.879.700</b>	<b>99,32</b>
4.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>310.000.000</b>	<b>307.879.700</b>	<b>99,32</b>
4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	200.000.000	198.600.000	99,30
4.2.01.02	Penyediaan Sandang	25.000.000	24.752.000	99,01
4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	9.600.000	96,00
4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000	20.000.000	100
4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	8.000.000	7.953.200	99,42
4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	8.000.000	7.974.500	99,68
4.2.01.07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	5.000.000	100
4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	5.000.000	100
4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.000.000	5.000.000	100
4.2.01.10	Pembelian Layanan Kedaruratan	5.000.000	5.000.000	100
4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	14.000.000	14.000.000	100
4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	5.000.000	5.000.000	100
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<b>8.624.999.700</b>	<b>8.432.437.000</b>	<b>97,77</b>
5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<b>8.624.999.700</b>	<b>8.432.437.000</b>	<b>97,77</b>
5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	67.110.000	89,48
5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	13.134.000	87,56
5.2.02.03	Fasilitas Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga	8.010.000.000	7.854.593.300	98,06

5.2.02.04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	524.999.700	497.599.700	94,78
6	Program Penanganan Bencana	<b>150.000.000</b>	<b>77.493.100</b>	<b>51,66</b>
6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<b>126.000.000</b>	<b>61.066.900</b>	<b>48,47</b>
6.2.01.01	Penyediaan Makanan	50.000.000	18.701.100	37,40
6.2.01.02	Penyediaan Sandang	50.000.000	26.295.000	52,59
6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	7.000.000	1.165.800	16,65
6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10.000.000	9.180.000	91,80
6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	9.000.000	5.725.000	63,61
6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<b>24.000.000</b>	<b>16.426.200</b>	68,44
6.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	2.000.000	770.000	38,50
6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	22.000.000	15.656.200	71,16
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	<b>189.999.489</b>	<b>180.326.800</b>	94,91
7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<b>189.999.489</b>	<b>180.326.800</b>	94,91
7.2.01.01	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-
7.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.999.489	39.888.500	99,72
7.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	150.000.000	140.438.300	93,63

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 4.876.331.650,- dan realisasi sebesar Rp. 4.254.371.521,- atau 87,25% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 92.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 86.591.750,- atau 93,61% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar

Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.12.913.500,- atau 86,09% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan, manmin dan perdin biasa disesuaikan kebutuhan.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.77.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 73.678.250,- atau 95,07% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan, manmin dan perdin biasa disesuaikan kebutuhan serta honor pejabat pengadaan yang ditiadakan.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.863.867.650,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.329.947.292,- atau 86,18% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.826.367.650,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.292.447.292,- atau 86,05% fisik sebesar 100%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.500.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten

Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.105.497.900,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.88.668.150,- atau 84.05% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.740.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.678.000,- atau 90,95% fisik sebesar 100%.
2. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp.13.106.400,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.12.920.100,- atau 98.58% fisik sebesar 100%.
3. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.32.200.500,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.906.400,- atau 80,45% fisik sebesar 100%.
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.119.750,- atau 81,20% fisik sebesar 100%.
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,-

- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.040.000,- atau 50.40% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.28.451.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.26.003.900,- atau 91.40% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- d) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.150.000,- atau 95,75% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Pengadaan mebel, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.550.000,- atau 95,50% fisik sebesar 100%.
  2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.600.000,- atau 96% fisik sebesar 100%.
- e) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.631.684.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.597.255.129,- atau 94,55% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp.117.000.000,-. Yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.95.776.557,- atau 81,86% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
  2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.920.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.11.732.000,- atau 78,63% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
  3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.499.764.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.489.746.572,- atau 98% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- f) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , dengan alokasi dana sebesar Rp.162.782.100,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.132.759.200,- atau 81,56% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.102.782.100,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.83.202.600,- atau 80,95% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar 0 atau 0% fisik.
  3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.556.600,- atau 99,11% fisik sebesar 100%.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial , dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.3.284.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.249.606.000,- atau 98,95% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan :
- ❖ Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.284.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.249.606.000,- atau 98,95% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
    1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.600.000,- atau 86% fisik sebesar 100%. Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam melakukan pembinaan terhadap 81 orang PSM.
    2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.173.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan berupa operasionalnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun realisasi

- keuangan sebesar Rp.155.400.000,- atau 89,83% fisik sebesar 100%. Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melakukan pembinaan terhadap 27 orang TKSK.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar 0 atau 0% fisik sebesar 100%.
  4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.081.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.077.006.000,- atau 99,87% fisik sebesar 100%. Kegiatannya bansos permakanan untuk penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 40 LKSA atau 1.450 anak.
  5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.600.000,- atau 86% fisik sebesar 100%.
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :
- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk

dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

- b. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% yaitu penanganan pada 47 orang terlantar, kehabisan bekal dan kecapetan. Mengingat pada Sub Kegiatan tersebut merupakan kondisi *Insidentil* berdasarkan laporan Kepolisian. bantuan transportasi pada orang terlantar, kecapetan dan kehabisan bekal dengan berdasarkan laporan dari kepolisian.

- 4) Program Rehabilitasi Sosial, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.310.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.307.879.700,- atau 99,32% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan:

- a). Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.310.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.307.879.700,- atau 99,32% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan:

- 1.Penyediaan Permakanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan

- sebesar Rp.198.600.000,- atau 99,30% fisik sebesar 100% berupa prioritas Bupati Bansos sembako pada Lansia. Adapun jumlahnya 1.000 Lansia.
2. Penyediaan Sandang, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.24.752.000,- atau 99,01% fisik sebesar 100% berupa prioritas Bupati Bansos sandang berupa peralatan ibadah pada anak asuh keluarga miskin. Adapun jumlahnya 50 anak.
  3. Penyediaan Alat Bantu, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.600.000,- atau 96% fisik sebesar 100% berupa bansos alat bantu kursi roda pada 2 disabilitas.
  4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa mempertemukan kembali ke keluarga Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS).
  5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.8.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.953.200,- atau 99,42% fisik sebesar 100%.
  6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.8.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi

- keuangan sebesar Rp. 7.974.500,- atau 99,68% fisik sebesar 100%.
7. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran dan kartu identitas anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam pengurusan NIK/KTP, KK, akta nikah, akta lahir.
  8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa pemberian pendampingan bagi PPKS terutama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ke layanan pendidikan atau LKS dan ke faskes kesehatan.
  9. Pemberian layanan data dan pengaduan, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa respon kasus baik dari masyarakat/kepolisian/kasus viral.
  10. Pemberian layanan kedaruratan, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa memberikan fasilitas pemakaman untuk orang terlantar yang tidak punya identitas (contoh : kecelakaan).
  11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten

Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa mencari/menelusuri alamat keluarga PPKS yang terjaring razia dengan bekerjasama dengan Disdukpencahil.

12. Pemberian Layanan Rujukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa pemberian rekomendasi bagi PPKS (disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, Anak berhadapan dengan hukum ke UPT Propinsi.

- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.8.624.999.700,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.8.432.437.000,- atau 97,77% dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan:

Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.8.624.999.700,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.8.432.437.000,- atau 97,77% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

1. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.67.110.000,- atau 89,48% fisik sebesar 100%.
2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.13.134.000,- atau 87,56% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.

3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.8.010.000.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.854.593.300,- atau 98,06% fisik sebesar 100% berupa operasional PKH.
4. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.524.999.700,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.497.599.700,- atau 94,78% fisik sebesar 100% meliputi :
  - a. Prioritas Bupati Program Yakin Semua Sejahtera (YSS) difokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat Kepala Rumah Tangga Perempuan Kurang Sejahtera (KRTPKS) dalam pemulihan dampak wabah covid-19 sekaligus implementasi dari Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih. Program YSS diprioritaskan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan Kurang Sejahtera (KRTPKS) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan yang dilakukan secara bertahap. Program YSS ini merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penanganan dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonominya. Bantuan berupa Uang sebagai Modal Usaha pada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP/Janda Produktif) supaya biasa mandiri dalam kehidupan keluarganya. Adapun jumlah penerima bansos program

- YSS sebanyak 32 KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan).
- b. Prioritas Bupati Program ROSELA merupakan salah satu kegiatan Pemerintah Kab. Lamongan yang dilaksanakan dalam rangka pemberian jaminan dan perlindungan sosial bagi warga miskin lansia agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam situasi daya beli masyarakat yang cenderung melemah akibat inflasi serta meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian penerima bansos teringankan beban hidupnya. Bantuan berupa makanan siap makan, sasaran Lansia. Jumlah Penerima Bansos ROSELA sebanyak 69 orang di 8 Kelurahan (Kelurahan Jetis, Banjarmendalan, Tumenggungan, Sidokumpul, Sukomulyo, Tlogo anyar, Sidoharjo, Sukorejo).
  - c. Prioritas Bupati Program BLT Sembako Daerah diperuntukan untuk warga Miskin Kelurahan yang belum tersentuh bantuan (Data Penerima Bansos berdasarkan DTKS). Bantuan berupa Sembako. Jumlah penerima BLT sembako Daerah sebanyak 111 orang di 12 Kelurahan.
- 6).Program Penanganan Bencana, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 77.493.100,- atau 51,66% sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :
1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.126.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali dan realisasi sebesar Rp.61.066.900,- atau 48,47% sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

1. Penyediaan makanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.18.701.100,- atau 37,40% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%. Adapun fisik 100% tersebut merupakan prioritas Bupati Basocana (bantuan sosial bencana) berupa sembako bagi korban bencana yang tidak tercover bantuan Cadangan Beras Bencana (contoh : kebakaran/ banjir). Penyediaan sandang, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.26.295.000,- atau 52,59% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%. Adapun fisik 100% tersebut merupakan prioritas Bupati Basocana (bantuan sosial bencana) berupa sandang bagi korban bencana yang tidak tercover bantuan Cadangan Beras Bencana (contoh : kebakaran/ banjir).
2. Penyediaan tempat penampungan pengungsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.7.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.165.800,- atau 16,65% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.180.000,- atau 91,80% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
4. Pelayanan dukungan psikososial, dengan alokasi dana sebesar Rp.9.000.000, yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.725.000,- atau 63,61% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.

- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali dan realisasi sebesar Rp.16.426.200,- atau 68,44 % sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.770.000,- atau 38,50% fisik sebesar 100%.
  2. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp. 22.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.656.200,- atau 71,16% fisik sebesar 100%.
- 7).Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 189.999.489,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp. 180.326.800,- atau 94,91% dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 189.999.489,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp. 180.326.800,- atau 94,91% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :
1. Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, tidak ada anggaran dikarenakan di

- alokasikan ke Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.39.999.489,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 39.888.500,- atau 99,72% fisik sebesar 100%.
  3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 2 kali upacara Hari Pahlawan dan HKSN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 140.438.300,- atau 93,63% fisik sebesar 100%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2024 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d 2024

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	06										
1	06	01									
1	06	01	2.01								
1	06	01	2.01	01							
1	06	01	2.01	07							

						birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)					birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)			
1	06	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>26 Dokumen</b>	<b>100%</b>
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	30/14 orang/bulan	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30/14 orang/bulan	30/14 orang/bulan	100%
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan akhir tahun	1 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan KIB dan laporan barang pengguna bulanan; jumlah laporan semesteran	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	15 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	14 laporan	100%
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu</b>	<b>12 laporan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>100%</b>	<b>12 laporan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>100%</b>
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	20 paket	20 jenis alat listrik	20 jenis alat listrik	20 jenis alat listrik	100%	20 paket	20 paket	100%
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	25 buah	25 buah	25 buah	100%	25 paket	25 Paket	100%
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik yang disediakan	4 Paket	1 cek; 1 paket pengiriman; 40 ATK; 50 prangko; 420 materai	1 cek; 1 paket pengiriman; 40 ATK; 50 prangko; 420 materai	1 cek; 1 paket pengiriman; 40 ATK; 50 prangko; 420 materai	100%	4 Paket	4 Paket	100%
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	14 paket	14 cetakan dan penggandaan	14 cetakan dan penggandaan	14 cetakan dan penggandaan	100%	14 paket	14 Paket	100%
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan, iklan/ucapan	7 Dokumen	7 surat kabar; 21 ucapan	7 surat kabar; 21 ucapan	7 surat kabar; 21 ucapan	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	60 Laporan	107 kali	60 Laporan	60 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
1	06	01	2.07		<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	06	01	2.07	05	pengadaan mebel	jumlah mebel yang diadakan	5 Unit	58 Unit	58 Unit	58 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
1	06	01	2.07	06	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	1 unit printer gaji; 1 laptop; 1 unit AC; 1 unit scan; 4 almari	1 unit printer gaji; 1 laptop; 1 unit AC; 1 unit scan; 4 almari	1 unit printer gaji; 1 laptop; 1 unit AC; 1 unit scan; 4 almari	100%	5 Unit	5 Unit	100%
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	06	01	2.08	02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	49 unit	49 unit	49 unit	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
1	06	01	2.08	03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Laporan	45 unit	45 unit	45 unit	100%	20 Laporan	20 Laporan	100%
1	06	01	2.08	04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah tenaga kontrak	1 Laporan	1 sopir; 2 keamanan; 2 kebersihan; 16 administrasi	1 sopir; 2 keamanan; 2 kebersihan; 16 administrasi	1 sopir; 2 keamanan; 2 kebersihan; 16 administrasi	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	06	01	2.09	01	peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan (kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional); jumlah mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 unit	2 mobil jabatan; 8 mobil operasional	2 mobil jabatan; 8 mobil operasional	2 mobil jabatan; 8 mobil operasional	100%	14 unit	14 unit	100%

1	06	01	2.09	06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 unit	25 item	25 item	25 item	100%	36 unit	36 Unit	100%
1	06	01	2.09	09	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1	06	02			<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah PSKS yang berkembang</b>	<b>701 orang</b>	<b>701 orang</b>	<b>701 orang</b>	<b>701 orang</b>	<b>100%</b>	<b>451 orang</b>	<b>451 orang</b>	<b>100%</b>
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	81 orang	81 orang	81 orang	81 orang	100%	81 orang	81 orang	100%
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	27 orang	27 orang	27 orang	27 orang	100%	27 orang	27 orang	100%
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	5 keluarga	50 keluarga	5 keluarga	5 keluarga	100%	5 Keluarga	-	-
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	513 orang (39 LKS & 474 kartar)	151 orang	513 orang (39 LKS & 474 kartar)	513 orang (39 LKS & 474 kartar)	100%	136 orang (40 LKS & 96 kartar)	136 orang (40 LKS & 96 kartar)	100%
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	5 Sertifikat	18 orang	5 Sertifikat	5 Sertifikat	100%	5 Sertifikat	5 Sertifikat	100%
1	06	03			<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

1	06	03	2.01		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	29 paket	50 paket	45 paket	90%	38 Orang	47 org	107,89%	Merupakan kondisi insidentil
1	06	04			<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dan direhabilitasi</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	04	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	1000 orang	1.500 Orang	1000 orang	1000 orang	100%	1000 orang	1000 orang	100%	Sesuai perencanaan
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	500 orang	500 Orang	500 orang	500 orang	100%	50 orang	50 orang	100%	Sesuai perencanaan
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%	Sesuai perencanaan
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	30 Orang	25 Orang	30 Orang	100%	15 Orang	49 Orang	100%	Merupakan kondisi insidentil berdasarkan razia

														satpopp	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	15 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	0%	Merupakan kondisi insidental berdasarkan razia satpopp
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah peserta bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 orang	100%	10 Orang	10 Orang	0%	Merupakan kondisi insidental berdasarkan razia satpopp
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	7 Orang	100%	5 Orang	7 Orang	100%	Merupakan kondisi insidental
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	7 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%	Merupakan kondisi insidental
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	6 Orang	5 Orang	15 Orang	100%	5 Orang	16 Orang	100%	Merupakan kondisi insidental berdasarkan razia satpopp
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	1 unit	5 Orang	6 Orang	100%	5 Orang	10 Orang	100%	Merupakan kondisi insidental
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	30 Orang	25 Orang	33 orang	100%	15 Orang	23 orang	100%	Merupakan kondisi insidental berdasarkan razia satpopp
1	06	04	2.01	12	Pemberian layanan rujukan	jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang		5 Orang	6 orang	100%	5 Orang	19 orang	100%	Merupakan kondisi insidental berdasarkan

															an razia satpopp
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang di data	654.426 Orang	4 kali	654.426 Orang	654.426 Orang	100%	654.426 Orang	654.426 Orang	100%	DTKS Validasi Kemensos RI per Februari 2022 sejumlah 654.426 orang.
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	600.000 keluarga/orang	4 kali	564.772 Keluarga	564.772 Keluarga	100%	600.000 Keluarga	623.918 orang	103,99%	Jumlah JKN secara keseluruhan : 1. PBI-JKN = 553.833 jiwa 2. PBID.= 70.085 jiwa
1	06	05	2.02	03	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	44.819 Keluarga	4 kali	48.995 Keluarga	48.995 Keluarga	100%	48.819 Keluarga	31.966 Keluarga	71,32%	Jumlah PKH secara global seluruh komponen sebanyak 31.966 KPM ada yang meninggal dan graduasi
1	06	05	2.02	04	Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	350 orang	17 kali	320 orang	320 orang	100%	224 orang	212 Orang	94,64%	Pada tribulan IV terealisasi 212 orang yang terdiri dari



															120 orang dikarenakan ada yang meninggal ada yang pindah domisili
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%	64,25%	64,25%	100%	100%	100%	Bencana merupakan kondisi insidental dan tidak bisa di prediksi
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	100%	100%	78,5%	78,5%	100%	100%	100%	Bencana merupakan kondisi insidental dan tidak bisa di prediksi
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	125 orang	25 Orang	125 orang	75 orang	60%	47 Orang	47 Orang	100%	Bencana merupakan kondisi insidental dan tidak bisa di prediksi
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang	80 orang	10 Orang	80 orang	58 orang	72,5%	47 Orang	47 Orang	100%	Bencana merupakan kondisi insidental dan tidak bisa di prediksi
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 unit	1 desa	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 Unit	100%	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	30 Orang	4 paket	41 Orang	41 orang	100%	29 Orang	29 Orang	100%	

1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	100 Orang	60 Orang	100 Orang	60 Orang	60%	600 Orang	60 Orang	100%
1	06	06	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga yang dibentuk	1 Kampung	1 unit	1 Kampung	0	0%	1 Kampung	1 kampung	100%
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah tagana yang aktif dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
1	06	07			<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Taman makam pahlawan dalam kondisi baik</b>	<b>1 TMP</b>	<b>1 TMP</b>	<b>1 TMP</b>	<b>1 TMP</b>	<b>100%</b>	<b>1 TMP</b>	<b>1 TMP</b>	<b>100%</b>
1	06	07	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara</b>	<b>1 TMP</b>	<b>1 TMP</b>	<b>1 TMP</b>	<b>1 TMP</b>	<b>100%</b>	<b>1 TMP</b>	<b>1 TMP</b>	<b>100%</b>
1	06	07	2.01	1	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	1 dokumen	1 paket	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah terpeliharanya fasilitas TMP	1 unit	1 unit	75 makam	75 makam	100%	75 makam	75 makam	100%
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah pengamanan taman makam pahlawan yang dilakukan; jumlah pelaksanaan upacara	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	2 tim pengamanan; 2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	100%	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	100%

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial didukung oleh 7 program, dimana di dalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 6 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Program Rehabilitas Sosial
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6) Program Penanganan Bencana
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Sosial, Dinas Sosial memiliki 7 Program (1 program rutin dan 6 program teknis) yang di dukung 14 Kegiatan (6 kegiatan rutin dan 8 kegiatan teknis) dan 47 Sub Kegiatan (19 sub kegiatan rutin dan 28 sub kegiatan teknis) yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial  
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penurunan PMKS	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	123,90%	100%	100%	- Formulasi perhitungan:  $\text{Realisasi} = \frac{\text{Disabilitas penerima rehab}}{\text{Disabilitas target keseluruhan}}$ - Reaisasi Capaian SPM dengan indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 123,90% dengan Realisasi jumlah penyandang disabilitas yang menerima rehabilitasi sosial di luar panti pada Tahun 2024 sejumlah 254 orang dan Jumlah Disabilitas target keseluruhan pada tahun 2024 sejumlah 205 orang. - Realisasi melebihi target dikarenakan di tribulan IV adanya razia Satpol PP fasilitas pembuatan NIK Disabilitas dan merujuk ke

											UPT untuk mendapatkan pelatihan.
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100,45%	100%	100%	<p>- Formulasi perhitungan:</p> <p>Realisasi</p> $= \frac{\text{Anak terlantar DTKS penerima rehab}}{\text{Anak terlantar DTKS keseluruhan}}$ <p>- Reaisasi Capaian SPM dengan indikator Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100,45% dengan Realisasi jumlah anak telantar yang menerima rehabilitasi sosial di luar panti pada Tahun 2024 sejumlah 1.548 orang dan Jumlah Anak terlantar target keseluruhan pada tahun 2024 sejumlah 1.541 orang.</p> <p>- Realisasi melebihi target karena adanya kondisi insidental yakni ABH yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di lembaga kesejahteraan sosial.</p>
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	108,05%	100%	100%	<p>- Formulasi perhitungan:</p> $\text{Realisasi} = \frac{\text{Lanjut usia penerima rehab}}{\text{Lanjut Usia target keseluruhan}}$ <p>- Reaisasi Capaian SPM dengan indikator</p>

												<p>Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 108,05% dengan Realisasi jumlah lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada Tahun 2024 sejumlah 12.944 orang dan Jumlah Lansia terlantar target keseluruhan pada tahun 2024 sejumlah 11.980 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi melebihi target karena jumlah PKH Plus sampai dengan tribulan IV.</li> </ul>
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	134,62%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan:  <math display="block">\text{Realisasi} = \frac{\text{Tuna sosial penerima rehab}}{\text{Tuna sosial target keseluruhan}}</math> </li> <li>- Reaisasi Capaian SPM dengan indikator Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 134,62% dengan Realisasi jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti pada Tahun 2024 sejumlah 70 orang dan Jumlah Tuna sosial target keseluruhan pada tahun 2024 sejumlah 52 orang.</li> </ul>	

												- Realisasi melebihi target dikarenakan adanya razia Satpol PP dan pemulangan klien dari UPT. Provinsi Jatim ke Kab. Lamongan.
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	137,59%	100%	100%		<p>- Formulasi perhitungan:</p> <p style="text-align: center;">Realisasi</p> $= \frac{\text{Korban bencana penerima rehab}}{\text{Korban bencana target keseluruhan}}$ <p>- Reaisasi Capaian SPM dengan indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebesar 137,59% dengan Realisasi jumlah korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada Tahun 2024 sejumlah 47 orang, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basokana makanan sebanyak 47 orang,</li> <li>2. Basokana sandang sebanyak 47 orang,</li> <li>3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (lansia) sebanyak 29 orang,</li> <li>4. Pelayanan dukungan psikososial</li> </ol>



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas bidang sosial, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan bidang sosial karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan Bidang Sosial di Kabupaten Lamongan adalah :

**” Perlunya penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial. ”**

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan.

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026  
Kabupaten Lamongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kab. Lamongan			22.572.214.359	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kab. Lamongan			25.605.736.512	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial	88,61%	5.513.789.459	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial	88,89%	6.240.160.747	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lamongan	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	17 dokumen	75.496.000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lamongan	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	17 dokumen	106.375.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen (renja perubahan, renja tahun n+1, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	8.743.800	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen (renstra perubahan, renja tahun n+1, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	17.250.000	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 laporan (LPPD, LKPJ, LKJIP, evaluasi renja tribulan, SAKIP, laporan reformasi birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)	66.752.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 laporan (LPPD, LKPJ, LKJIP, evaluasi renja tribulan, SAKIP, laporan reformasi birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)	89.125.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>3.691.242.759</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>4.036.108.722</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30/14 orang/bulan	3.657.080.159	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30/14 orang/bulan	3.992.983.722	
Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lamongan	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	11.437.500	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lamongan	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14.375.000	
Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Lamongan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	22.725.100	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Lamongan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	28.750.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu</b>	<b>12 laporan</b>	<b>77.943.100</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu</b>	<b>12 laporan</b>	<b>109.250.000</b>	
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lamongan	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 paket	8.908.800	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lamongan	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 paket	11.500.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamongan	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	8.089.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamongan	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	11.500.000	

Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Lamongan	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	16.591.100	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Lamongan	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	28.750.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamongan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamongan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 paket	11.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamongan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamongan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 Dokumen	11.500.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 Laporan	29.354.100	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	34.500.000	
<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.009.231.700</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.061.500.000</b>	
pengadaan mebel	Kab. Lamongan	jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	9.231.700	pengadaan mebel	Kab. Lamongan	jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	11.500.000	
pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Lamongan	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	1.000.000.000	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Lamongan	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	1.050.000.000	
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>480.472.900</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>731.427.025</b>	
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Lamongan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	127.000.000	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Lamongan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	134.550.000	
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lamongan	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Laporan	7.898.900	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lamongan	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Laporan	11.500.000	
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Lamongan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	345.574.000	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Lamongan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	585.377.025	

<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>179.403.000</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>195.500.000</b>	
peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Lamongan	jumlah kendaraan perorangan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	106.007.600	peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Lamongan	jumlah kendaraan perorangan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 unit	126.500.000	
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Lamongan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 Unit	8.620.000	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Lamongan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 unit	11.500.000	
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lamongan	jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	64.775.400	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lamongan	jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	57.500.000	
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>100%</b>	<b>3.218.715.100</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>100%</b>	<b>3.690.580.000</b>	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>jumlah PSKS yang berkembang</b>	<b>191 orang</b>	<b>3.218.715.100</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>jumlah PSKS yang berkembang</b>	<b>701 orang</b>	<b>3.690.580.000</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	136 orang (40 LKS & 96 kartar)	3.018.349.500	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	136 orang (40 LKS & 96 kartar)	3.473.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	56 orang	200.365.600	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	56 orang	217.580.000	

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kab. Lamongan	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	10.000.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kab. Lamongan	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	11.500.000	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lamongan	Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100%	10.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lamongan	Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100%	11.500.000	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lamongan	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	10.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lamongan	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	11.500.000	
Program Rehabilitasi Sosial	Kab. Lamongan	Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dan direhabilitasi	100%	477.344.100	Program Rehabilitasi Sosial	Kab. Lamongan	Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dan direhabilitasi	100%	317.400.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lamongan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	474.251.100	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lamongan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	311.650.000	
Penyediaan Permakanan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi mnimal kewenangan kabupaten/kota	620 orang	144.506.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi mnimal kewenangan kabupaten/kota	620 orang	172.500.000	

Penyediaan Sandang	Kab. Lamongan	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	22.492.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lamongan	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	40 orang	28.750.000	
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 orang	10.845.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Orang	12.650.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 orang	22.971.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	28.750.000	
Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	Kab. Lamongan	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	5 orang	95.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	Kab. Lamongan	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	11.500.000	
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lamongan	jumlah peserta bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	5 orang	6.236.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lamongan	jumlah peserta bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	11.500.000	
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	5 orang	3.256.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	5.750.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	5 orang	5.324.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	5.750.000	

**Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	5 orang	6.573.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	9.200.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 orang	153.265.600	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	17.250.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	3 orang	3.782.500	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	3 Orang	8.050.000	
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial</b>	<b>100%</b>	<b>3.093.000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial</b>	<b>100%</b>	<b>5.750.000</b>	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	Kab. Lamongan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	3.093.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	Kab. Lamongan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	5.750.000	
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Prosentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>13.072.571.700</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Prosentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>14.977.405.765</b>	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>persentase data fakir miskin yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>13.072.571.700</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>persentase data fakir miskin yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>14.977.405.765</b>	

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang di data	654.426 Orang	47.654.400	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang di data	654.426 Orang	86.250.000	
Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kab. Lamongan	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	184 Orang	498.986.200	Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kab. Lamongan	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	184 orang	586.500.000	(YSS 32 orang ROSELA 72 orang BLT Sembako Daerah/ Kelurahan 80 orang)
Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kab. Lamongan	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	44.819 Keluarga (PKH) ; 15.150 orang (Penerima BIt-dbhcht) ; 1 unit rumah singgah	12.516.031.100	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kab. Lamongan	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	44.819 Keluarga (PKH) ; 15.150 orang (Penerima BIt-dbhcht) ; 1 unit rumah singgah	14.287.405.765	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	600.000 Keluarga	9.900.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	600.000 Keluarga/orang	17.250.000	
Program Penanganan Bencana	Kab. Lamongan	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	107.320.000	Program Penanganan Bencana	Kab. Lamongan	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	150.190.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	94.400.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	129.490.000	
Penyediaan Makanan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 orang	37.200.000	Penyediaan Makanan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 orang	57.500.000	

Penyediaan Sandang	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	57 orang	36.920.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	57 orang	46.000.000	
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	10.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lamongan	jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	11.500.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lamongan	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	75 Orang	6.100.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lamongan	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	75 Orang	8.740.000	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Lamongan	jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	1 unit	4.180.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Lamongan	jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	1 unit	5.750.000	
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana</b>	<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana</b>	<b>100%</b>	<b>20.700.000</b>	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Lamongan	jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 Kampung	5.120.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Lamongan	jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 Kampung	9.200.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lamongan	jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	7.800.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lamongan	jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	11.500.000	

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Lamongan	Taman makam pahlawan dalam kondisi baik	1 TMP	172.474.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Lamongan	Taman makam pahlawan dalam kondisi baik	1 TMP	218.500.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	1 TMP	172.474.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	1 TMP	218.500.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 makam	10.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 makam	31.654.900	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	jumlah laporan hasil pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	162.474.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	jumlah laporan hasil pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	186.845.100	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

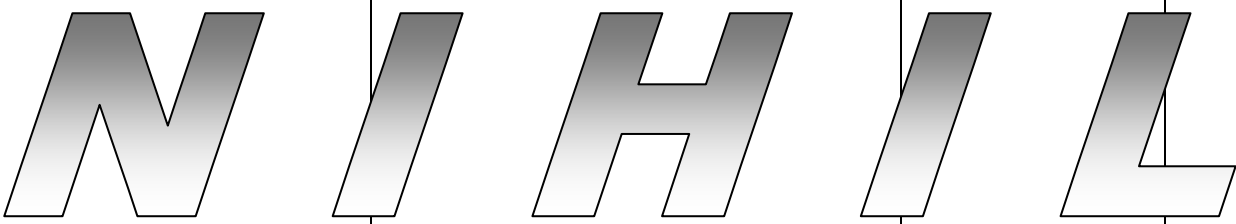
Program/kegiatan dari usulan masyarakat kepada masing-masing bidang juga pendataan verval yang dilakukan oleh bidang, yang selanjutnya dihimpun oleh Bagian Program Dinas Sosial untuk diusulkan ke Bappeda selaku pengkoordinasi usulan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( usulan RKPD ).

Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Sosial dalam hal ini sebagai dinas yang melayani kebutuhan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

TABEL T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026  
KABUPATEN LAMONGAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					

Catatan : Dinas Sosial kab. Lamongan tidak ada Pokir Dewan.

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

**3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, adalah :

**Prioritas Nasional :**

1. Memperkuat Pertahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

**Arah Kebijakan Nasional :**

- a. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.

- c. penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
- d. mendorong pemulihan dunia usaha.
- e. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
- f. ekonomi hijau;
- g. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 :

“ Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “.

Kebijakan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, adalah :

Prioritas Provinsi Jawa Timur :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktifitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;

6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur :

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal;
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Sanitasi dan Sosial Dasar khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana;
7. Tatakelola pemerintahan yang belum optimal.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 Provinsi Jatim :

---

“ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung “.

Kebijakan Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, adalah :

Prioritas Kabupaten Lamongan :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi yang adil dan merata;
2. Penguatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas unggulan, UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik ;
3. Penguatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing berskala regional;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik dan insrastruktur dasar serta optimalisasi infrastruktur kawasan industri baru dan realisasi ringroad utara;
5. Peningkatan Stabilitas dan Kondusifitas Sosial;

Arah Kebijakan Kabupaten Lamongan :

“Penguatan Landasan-landasan Pembangunan (Pondasi)”

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 Kabupaten Lamongan :

---

“Menguatkan Stabilitas Sosial Ekonomi dan Pengembangan Industri Sektor Unggulan melalui Perluasan Pasar dan Daya Saing Regional“

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Visi Kabupaten Lamongan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026, adalah:

**”Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
- 2) **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dari kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, "**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**" ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

**Misi 1.**

**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Keunggulan Daerah**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus dari Pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta

ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan.

**Misi 2.**

**Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga.

**Misi 3.**

**Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan focus pada peningkatan kualitas layanan dan koneksifitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana.

**Misi 4.**

**Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tentram,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Representasi

ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.

#### **Misi 5.**

**Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke I (satu) dengan Sasaran 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Lamongan dan Misi ke IV (empat) dengan Sasaran 14 (empat belas) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021 – 2026, yaitu :

#### **Tujuan Dinas Sosial**

1. Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Indikator : Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya.

2. Meningkatkan solidaritas masyarakat dalam bergotong royong

Indikator : Nilai Solidaritas

### **Sasaran Dinas Sosial**

1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Indikator : Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah.

Indikator : Nilai SAKIP Dinas Sosial.

3. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Indikator : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Urusan Sosial di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2026 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melalui 7 Program (meliputi 6 Program Pembangunan

dan 1 Program Rutin), 14 kegiatan (meliputi 8 kegiatan pembangunan dan 6 kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) dan 47 kegiatan (meliputi 28 Sub Kegiatan pembangunan dan 19 Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawahi :

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - 1.4.1. Pengadaan Mebel;
  - 1.4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 1.5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## 2. Program Pemberdayaan Sosial

- 2.0.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :
- 2.0.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

- 2.0.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
  - 3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal :
    - 3.1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
4. Program Rehabilitasi Sosial
  - 4.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :
    - 4.1.1. Penyediaan Permakanan;
    - 4.1.2. Penyediaan Sandang;
    - 4.1.3. Penyediaan Alat Bantu;
    - 4.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
    - 4.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
    - 4.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;

- 4.1.7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- 4.1.8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 4.1.9. Pembelian Layanan Kedaruratan;
- 4.1.10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- 4.1.11. Pemberian Layanan Rujukan.
- 4.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - 4.2.1 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.
- 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 5.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:
    - 5.1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
    - 5.1.2. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
    - 5.1.3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
    - 5.1.4. Pengelolaaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- 6. Program Penanganan Bencana
  - 6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota :
    - 6.1.1. Penyediaan Makanan;
    - 6.1.2. Penyediaan Sandang;

- 6.1.3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- 6.1.4. Pelayanan Dukungan Psikososial;
- 6.1.5. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.
- 6.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota :
  - 6.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
  - 6.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.
- 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
  - 7.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota :
    - 7.1.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
    - 7.1.2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

**TABEL T-C.33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								
1	0	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	Kab. Lamongan	100%	3.218.715.100			100%	3.690.580.000
1	0	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSKS yang berkembang	Kab. Lamongan	191 orang	3.218.715.100			701 orang	3.690.580.000
1	0	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	136 orang (40 LKS & 96 kartar)	3.018.349.500	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial kewenangan kabupaten/kota	136 orang (40 LKS & 96 kartar)	3.473.000.000
1	0	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Lamongan	56 orang	200.365.600	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	56 orang	217.580.000
1	0	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	Kab. Lamongan	100%	10.000.000			100%	11.500.000

**Minas Sosial Kabupaten Lamongan**

1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal</b>	Kab. Lamongan	100%	10.000.000			100%	11.500.000
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	50 orang	10.000.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal kewenangan kabupaten/kota	50 orang	11.500.000
1	06	04			<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dan direhabilitasi</b>	Kab. Lamongan	100%	477.344.100			100%	317.400.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</b>	Kab. Lamongan	100%	474.251.100			100%	311.650.000
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	620 orang	144.506.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya kebutuhan permakanan perorang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	620 orang	172.500.000

**Mimas Sosial Kabupaten Lamongan**

1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	40 Orang	22.492.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	40 orang	28.750.000
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	2 orang	10.845.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	2 Orang	12.650.000
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	10 orang	22.971.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	28.750.000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	5 orang	95.000.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	11.500.000
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah peserta bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	5 orang	6.236.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakatan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	11.500.000
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	<b>Kab. Lamongan</b>	5 orang	3.256.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	5.750.000

**Minas Sosial Kabupaten Lamongan**

1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	5 orang	5.324.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	5.750.000
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	5 orang	6.573.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	9.200.000
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	10 orang	153.265.600	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	17.250.000
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	3 orang	3.782.500	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pemberian layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	3 Orang	8.050.000
1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial</b>	Kab. Lamongan	100%	<b>3.093.000</b>			<b>100%</b>	<b>5.750.000</b>
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	3 orang	3.093.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		3 Orang	5.750.000

**Minas Sosial Kabupaten Lamongan**

1	06	05			<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Prosentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>100%</b>	<b>13.072.571.700</b>			<b>100%</b>	<b>14.977.405.765</b>
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	<b>persentase data fakir miskin yang dikelola</b>	Kab. Lamongan	<b>100%</b>	<b>13.072.571.700</b>			<b>100%</b>	<b>14.977.405.765</b>
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang di data	Kab. Lamongan	654.426 Orang	47.654.400	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	654.426 Orang	86.250.000
1	06	05	2.02	0004	Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	184 Orang	498.986.200	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonmi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	184 orang	586.500.000
1	06	05	2.02	0006	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	44.819 Keluarga (PKH) ; 15.150 orang (Penerima Blt-dbhcht) ; 1 unit rumah singgah	12.516.031.100	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	terpenuhinya keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	44.819 Keluarga (PKH) ; 15.150 orang (Penerima Blt-dbhcht) ; 1 unit rumah singgah	14.287.405.765
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	<b>Kab. Lamongan</b>	600.000 Keluarga	9.900.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pengentasan keluarga fakir miskin kabupaten/kota	600.000 Keluarga/orang	17.250.000
1	06	06			<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase korban bencana yang tertangani</b>	Kab. Lamongan	<b>100%</b>	<b>107.320.000</b>			<b>100%</b>	<b>150.190.000</b>
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Kab. Lamongan	<b>100%</b>	<b>94.400.000</b>			<b>100%</b>	<b>129.490.000</b>

**Minas Sosial Kabupaten Lamongan**

1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	<b>Kab. Lamongan</b>	100 orang	37.200.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang mendapatkan pemakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 orang	57.500.000
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	<b>Kab. Lamongan</b>	57 orang	36.920.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	57 orang	46.000.000
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	30 Orang	10.000.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	11.500.000
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	<b>Kab. Lamongan</b>	75 Orang	6.100.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kewenangan kabupaten/kota	75 Orang	8.740.000
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	<b>Kab. Lamongan</b>	1 unit	4.180.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	1 unit	5.750.000
1	06	06	2.01		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		<b>100%</b>	<b>20.700.000</b>

**Minas Sosial Kabupaten Lamongan**

					Kabupaten/Kota								
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	1 Kampung	5.120.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 Kampung	9.200.000
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lamongan	40 Orang	7.800.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terpenuhinya orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	11.500.000
1	06	07			<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Taman makam pahlawan dalam kondisi baik</b>	Kab. Lamongan	<b>1 TMP</b>	<b>172.474.000</b>			<b>1 TMP</b>	<b>218.500.000</b>
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	Kab. Lamongan	<b>1 TMP</b>	<b>172.474.000</b>			<b>1 TMP</b>	<b>218.500.000</b>
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Kab. Lamongan	1 makam	10.000.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 makam	31.654.900
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Kab. Lamongan	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	162.474.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	186.845.100

**Minas Sosial Kabupaten Lamongan**

1	06	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai IKM Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial</b>	Kab. Lamongan	<b>88,61%</b>	<b>5.513.789.459</b>			<b>88,89%</b>	<b>6.240.160.747</b>
1	06	01	2.01		<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>17 dokumen</b>	<b>75.496.000</b>		<b>tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>17 dokumen</b>	<b>106.375.000</b>
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lamongan	7 dokumen (renja perubahan, renja tahun n+1, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	8.743.800	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen (renstra perubahan, renja perubahan, renja tahun n+1, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	17.250.000
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lamongan	10 laporan (LPPD, LKPJ, LKJIP, evaluasi renja tribulan, SAKIP, laporan reformasi birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)	66.752.200	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	10 laporan (LPPD, LKPJ, LKJIP, evaluasi renja tribulan, SAKIP, laporan reformasi birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)	89.125.000
1	06	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>3.691.242.759</b>		<b>terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>29 dokumen</b>	<b>4.036.108.722</b>
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Lamongan	30/14 orang/bulan	3.657.080.159	Dana Alokasi Umum (DAU)	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	30/14 orang/bulan	3.992.983.722
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	<b>Kab. Lamongan</b>	1 laporan	11.437.500	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14.375.000

1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	<b>Kab. Lamongan</b>	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	22.725.100	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	28.750.000
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu</b>	Kab. Lamongan	<b>12 laporan</b>	<b>77.943.100</b>		<b>terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>12 laporan</b>	<b>109.250.000</b>
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	20 paket	8.908.800	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 paket	11.500.000
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Lamongan	25 paket	8.089.900	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya peralatan rumah tangga	25 paket	11.500.000
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	4 Paket	16.591.100	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya bahan logistik kantor	4 Paket	28.750.000
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Lamongan	14 paket	5.000.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	14 paket	11.500.000
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	<b>Kab. Lamongan</b>	7 Dokumen	10.000.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 Dokumen	11.500.000
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	6 Laporan	29.354.100	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	34.500.000

**Minas Sosial Kabupaten Lamongan**

1	06	01	2.07		<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan</b>	Kab. Lamongan	<b>100%</b>	<b>1.009.231.700</b>		<b>terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.061.500.000</b>
1	06	01	2.07	0005	pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Lamongan	5 Unit	9.231.700	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya mebel	5 Unit	11.500.000
1	06	01	2.07	0010	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Lamongan	1 Unit	1.000.000.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Unit	1.050.000.000
1	06	06	2.08		<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik</b>	Kab. Lamongan	<b>100%</b>	<b>480.472.900</b>			<b>100%</b>	<b>731.427.025</b>
1	06	01	2.08	0002	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	<b>Kab. Lamongan</b>	3 Laporan	127.000.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan	134.550.000
1	06	01	2.08	0003	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	20 Laporan	7.898.900	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20 Laporan	11.500.000
1	06	01	2.08	0004	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	1 Laporan	345.574.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	585.377.025
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	Kab. Lamongan	<b>100%</b>	<b>179.403.000</b>			<b>100%</b>	<b>195.500.000</b>
1	06	01	2.09	0001	peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	<b>Kab. Lamongan</b>	14 Unit	106.007.600	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	14 unit	126.500.000

**Minas Sosial Kabupaten Lamongan**

1	06	01	2.09	0006	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Lamongan	36 Unit	8.620.000	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	36 unit	11.500.000
1	06	01	2.09	0009	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Lamongan	1 Unit	64.775.400	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	57.500.000

## BAB V

### PENUTUP

#### a. Catatan Penting

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

RENJA Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

#### b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih penanganan. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.
- c. **Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, 29 Juli 2025

  
**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN**  
  
**FARAH DAMAYANTI Z., S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730509 199803 2 005